

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Halim, Akutansi Sektor Publik, Akutansi Keuangan Daerah, (Jakarta : Selembar Empat, 2002)
- Bungaran Antonius, Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
- Diana Halim Koentjoro, Hukum Adiministrasi Negara , (Bogor: Ghalia, 2004)
- Endar Sugiarto, dan Kusmayadi, Metedologi Penelitian dalam Bidang Pariwisata ,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Fandeli, Chafid, Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataan Alam ,Kebiasaan Pembangunan Pariwisata Nasional Indonesia , (Yogyakarta:Liberty, 2001)
- Gamal Suwanto, Dasar-dasar Pariwisata (Yogyakarta, Andi 2004)
- Happy Marpaung, Pengetahuan Kepariwisataan (Bandung: Alfabeta, 2002)
- H.A.W.Wijaya , Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Ismail Tjip, Kebijakan Pajak Daerah dari Retribusi Daerah, (Jakarta, Yellow Printing 2002)
- Juniarso Wirdan, Hukum Adiministrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik (Bandung: Nuansa,2009)
- Juniarso Wirdan, Hukum Adiministrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik (Bandung: Nuansa 2009)
- Marbun, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Adiministrasi Negara, (Yogyakarta: UII pers, 2001)
- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintah Daerah (Bandung: Nusa Media, 2009)
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Pemerintahan Daerah di Indonesia ,(Bandung : CV Pustaka, 2005)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008)
- Wahab Salah , Manajemen Kepariwisataan (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003)

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
7. Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2026

Sumber Lainnya

1. Rahmawati, “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan” ISSN, 1 Februari, Jurnal Academia Fisip Untad.
2. Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” dalam Abd.Rachim, Barometer Keuangan Negara/Daerah (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2015), halaman 49.
3. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Karawang
4. Lakip Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang